

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 23 Vol. II. Desember 2017

Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli

p. 9

Dukungan SDM untuk Pariwisata Indonesia

p. 03

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



9 772502 868006

Update APBN **p.2**

Posisi Utang Pemerintah per September 2017

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

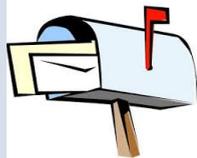
Redaktur

Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.
Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.
Marihot Nasution, S.E., M.Si
Adhi Prasetyo S. W., S.M.

Editor

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
Ade Nurul Aida, S.E.

Kritik/
Saran



puskajianggaran@dpr.go.id

Dukungan SDM untuk Pariwisata Indonesia **p.3**

PARIWISATA bahkan telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia, yang ditandai antara lain dengan perkembangan jumlah kunjungan turis dan pendapatan yang diperoleh dari turis internasional. Studi ini mengkaji pentingnya pariwisata bagi perekonomian Indonesia, melihat kondisi sumber daya manusia (SDM) pariwisata Indonesia baik dari tenaga profesional maupun dari masyarakat lokal, dan juga melihat sejauh mana pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk pariwisata ini.

Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli **p.9**

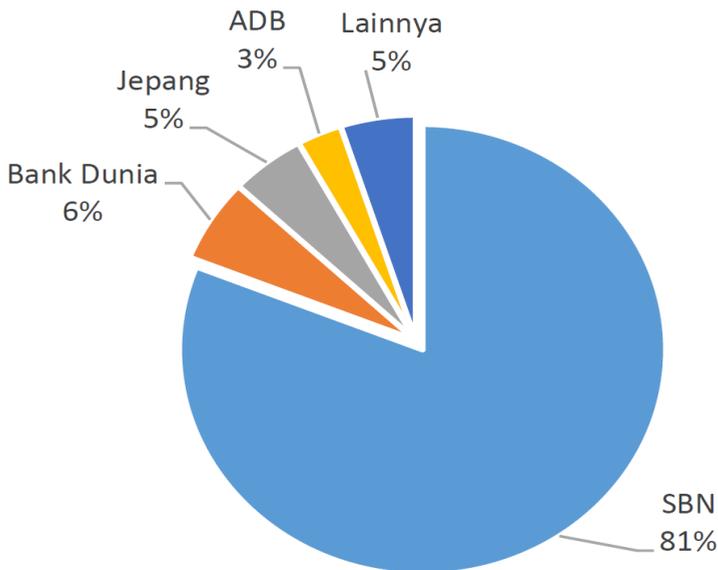
MENINGKATKAN daya saing ekonomi Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam jangka panjang. Melihat karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah seharusnya juga memprioritaskan upaya-upaya untuk menjaga daya beli masyarakat yang mengalami pertumbuhan melambat.

Update APBN

Posisi Utang Pemerintah per September 2017

Penambahan utang di September 2017 tercatat sejumlah Rp40,66 triliun, berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp40,51 triliun (neto) dan penarikan pinjaman sebesar Rp0,15 triliun (neto). Dengan adanya tambahan pembiayaan utang tersebut, belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial dapat ditingkatkan. Sampai dengan akhir September 2017, utang Pemerintah Pusat berjumlah Rp3.866,45 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp2.591,55 triliun (67,0 persen), SBSN sebesar Rp536,91 triliun (13,9 persen), dan pinjaman sebesar Rp737,99 triliun (19,1 persen). Utang Pemerintah Pusat berdasarkan krediturnya didominasi oleh investor SBN (81 persen), kemudian pinjaman dari Bank Dunia (6 persen), Jepang (5 persen), ADB (3 persen), dan lembaga lainnya (5 persen).

Posisi Utang Pemerintah per September 2017



Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan 2017

Dukungan SDM untuk Pariwisata Indonesia

oleh

Redaktur Buletin*)

Indonesia dianugerahi wilayah yang luas dan kaya akan keindahan alam. Hal ini yang membuat kunjungan wisatawan semakin bertambah. Namun jika keindahan tidak dijaga dan tidak dilengkapi dengan hadirnya *hospitality* dari masyarakat lokal, potensi pariwisata tersebut tidak akan berkembang dan bahkan tidak termanfaatkan. Studi ini mengkaji pentingnya pariwisata bagi perekonomian Indonesia, melihat kondisi sumber daya manusia (SDM) pariwisata Indonesia baik dari tenaga profesional maupun dari masyarakat lokal, dan juga melihat sejauh mana pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk pariwisata ini.

Pentingnya Pariwisata dalam Perekonomian Indonesia

Dewasa ini, pariwisata tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang relatif kaya, melainkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, pariwisata bahkan telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia, yang ditandai antara lain dengan perkembangan jumlah kunjungan turis dan pendapatan yang diperoleh dari turis internasional.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia Oktober 2017 naik 11,33 persen dibanding jumlah kunjungan pada

Oktober 2016, yaitu dari 1,04 juta kunjungan menjadi 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, data BPS juga menunjukkan bahwa secara kumulatif (Januari - Oktober 2017), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 11,62 juta kunjungan atau naik 23,55 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 9,40 juta kunjungan. Upaya peningkatan konsumsi wisatawan mancanegara memberikan dampak peningkatan pendapatan nasional lebih besar dibandingkan dampak peningkatan konsumsi wisatawan nusantara (Nur Aliah, 2016).

Pengeluaran wisatawan (mancanegara, nusantara, dan nasional), investasi di bidang kepariwisataan, dan pengeluaran pemerintah untuk promosi pariwisata adalah bagian dari permintaan ekonomi. Timbulnya pengeluaran-pengeluaran di sektor kepariwisataan tersebut akan berdampak positif pada penciptaan sejumlah variabel makro ekonomi, disamping dampak negatif seperti meningkatnya impor dan dampak non ekonomi. Tabel 1 menyajikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata terhadap sejumlah variabel ekonomi makro, yaitu *output*, produk domestik bruto (PDB), kompensasi tenaga kerja, dan pajak atas produksi neto pada tahun 2015. Dampak kegiatan pariwisata yang ditimbulkan secara ekonomi

*)Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: buletin.apbn@gmail.com

Tabel 1. Dampak Ekonomi Kegiatan Pariwisata tahun 2015

Uraian	Output (triliun Rp)	PDB (triliun Rp)	Kompensasi TK (triliun Rp)	Pajak atas Produksi Neto (triliun Rp)
A. Nilai Ekonomi Nasional	22 328,56	11 531,72	3 709,10	96,76
B. Nilai Ekonomi Pariwisata	990,44	489,62	148,11	3,93
1. Wisman	300,48	160,77	45,56	1,25
2. Wisnus	389,15	192,32	57,12	1,58
3. Wisnas	12,69	6,35	1,87	0,05
4. Investasi	273,97	122,18	37,96	1,03
5. Promosi & Pembinaan oleh Pemerintah	14,15	8,01	5,59	0,02
C. Peranan Pariwisata (persen)	4,44	4,25	3,99	4,06
1. Wisman	1,35	1,39	1,23	1,29
2. Wisnus	1,74	1,67	1,54	1,63
3. Wisnas	0,06	0,06	0,05	0,05
4. Investasi	1,23	1,06	1,02	1,06
5. Promosi & Pembinaan oleh Pemerintah	0,06	0,07	0,15	0,02

Sumber: Nesparnas, 2016

adalah 1) dampak langsung berupa konsumsi barang dan jasa, serta dampak tak langsung berupa interaksi antar sektor yang terjadi akibat perubahan *output* barang dan jasa yang dikonsumsi; 2) besarnya PDB yang dihasilkan biasanya sejalan dengan nilai *output* yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, demikian pula dengan permintaan produk pariwisata akan memberi perubahan pula pada besarnya PDB seluruh unit usaha; 3) adanya aktivitas pariwisata dipercaya akan menciptakan lapangan pekerjaan, yang selanjutnya akan menciptakan kompensasi tenaga kerja berupa balas jasa pekerja.

Kondisi SDM untuk Pariwisata Indonesia

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, selain harus diimbangi dengan jumlah sarana dan prasarana, juga harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Selain dipengaruhi jumlah fasilitas (sisi *supply*), kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja usaha yang melayani secara langsung terhadap permintaan wisatawan, seperti perhotelan, usaha objek daya tarik wisata, dan restoran.

Berdasar data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2015, pada Agustus 2015 jumlah tenaga kerja pada industri pariwisata mencapai 10,36 juta orang atau 9,03 persen terhadap total tenaga kerja nasional yang berjumlah 114,82 juta orang. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari 10,36 juta orang, porsi terbesar (28,53 persen) merupakan mereka yang berstatus berusaha mandiri, sementara yang berstatus berusaha dibantu buruh dan karyawan/buruh sebesar 26,75 persen dan 25,72 persen. Untuk yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar mencapai 17,47 persen. Apabila dilihat menurut pendidikan yang ditamatkan, tenaga kerja industri pariwisata didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sampai SMP (59,39 persen). Hal ini menunjukkan pariwisata dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia karena secara umum bekerja pada industri pariwisata tidak memerlukan keahlian yang tinggi (Nesparnas, 2016).

Dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kepariwisataan, sejumlah kelemahan SDM kepariwisataan harus diperbaiki terutama dalam hal penguasaan bahasa Inggris, teknologi informasi (IT), maupun manajerial.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Tahun 2015

Pendidikan	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
01. ≤ SMP	6 155 385	59,39
02. SMA	3 526 222	34,02
03. Diploma I/II/III	276 793	2,67
04. Universitas	405 257	3,91
Jumlah	10 363 657	100,00

Sumber: BPS, 2015 dalam Nesparnas, 2016

Pada tahun 2015 daya saing SDM pariwisata Indonesia di tingkat ASEAN masih berada di ranking 5, di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina, sedangkan di tingkat dunia berada di ranking 53 dari 141 negara atau jauh tertinggal dari Singapura di ranking 3 dan Filipina di ranking 42 dunia. (kemenpar)

Dalam pengembangan kapasitas dan kualitas SDM, pariwisata ini menghadapi beberapa tantangan, diantaranya rendahnya kompetensi instruktur, guru, dan dosen vokasi sektor pariwisata. Kapasitas dan kualitas SDM pariwisata dapat meningkat jika didukung dengan instruktur, guru, dan dosen vokasi sektor pariwisata yang memiliki kapasitas dan berkualitas. Peningkatan kapasitas maupun kualitas tersebut dapat berupa sertifikasi profesi, mengadakan seminar terkait kapasitas SDM pariwisata, memberikan pelatihan teknis terkait kompetensi, melakukan *short course* ke luar negeri, serta memfasilitasi kerja sama dengan dunia industri terkait kegiatan magang instruktur, guru, dan dosen vokasi. Kendala lainnya antara lain *mismatch* antara kualitas SDM pariwisata yang dihasilkan dengan kualitas *skill* SDM pariwisata yang dibutuhkan industri. Permasalahan ini terjadi disebabkan oleh penyusunan kurikulum pendidikan pariwisata tidak disusun secara bersama antara akademisi dan *stakeholder* yang menggunakan SDM pariwisata. (Setiawan, 2016).

Pembangunan di sektor pariwisata tidak dapat terlepas dari kesadaran masyarakat di sekitar daerah wisata. Saat ini, tingkat sadar pariwisata dari masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor diantaranya: 1) Sikap berlebihan masyarakat terhadap kehadiran wisatawan asing. Tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap kehadiran wisatawan asing yang cukup tinggi menyebabkan wisman merasa kurang nyaman dan menjadikan suasana kurang kondusif; 2) Masih berkembangnya stigma di masyarakat bahwa kegiatan di sektor pariwisata akan merusak moral masyarakat lokal; 3) Sektor pariwisata masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat. (Deviana, 2017)

Program Pemerintah Untuk Peningkatan SDM Pariwisata

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM pariwisata yang tahun ini diwujudkan dalam program kegiatan dengan memfasilitasi kegiatan sertifikasi bagi 35.000 tenaga kerja sektor pariwisata di tahun 2016 lalu. Selain itu Kemenpar juga melakukan program kegiatan memfasilitasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pariwisata di 34 provinsi serta pelatihan dasar pariwisata untuk 17.600 orang di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi wisatawan yang tahun ini menargetkan kedatangan 12 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 260 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di Tanah Air. Pelatihan dasar pariwisata antara lain berupa pemberian pemahaman dan pelatihan penerapan Sapta Pesona (keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keindahan, keramahtamahan, dan kenangan) bagi SDM pariwisata sebagai kunci utama dalam menciptakan pelayanan prima bagi wisatawan dalam rangka

peningkatan daya saing.

Pendidikan di bidang pariwisata juga menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan. Saat ini terdapat tiga bidang sekolah kejuruan yang diprioritaskan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Budaya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal untuk memperkuat daya saing ekonomi. Direktur Pembinaan SMK Mustaghfirin Amin mengatakan bahwa ketiga jurusan tersebut ialah Kemaritiman, Pertanian dalam Pariwisata (Beritasatu, 2015). Selanjutnya dalam meningkatkan kualitas kejuruan pariwisata, pemerintah telah menyusun acuan penyelenggaraan bidang/program/kompetensi pada SMK/MAK yang tertuang dalam Keputusan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK), dimana spektrum yang dimaksud terbagi menjadi 9 yang salah satunya pariwisata.

Dalam spektrum pariwisata, terbagi menjadi empat program keahlian dan delapan kompetensi keahlian (lihat tabel 3). Pada setiap kompetensi keahlian mencakup 3 muatan mata pelajaran, yang terdiri dari muatan nasional, muatan kewilayahan serta muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan inilah yang menjadi fokus dalam membentuk keahlian siswa di bidang pariwisata. Dimana muatan ini terbagi lagi menjadi 3 bidang yaitu dasar bidang keahlian (simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan, kepariwisataan), dasar program keahlian (komunikasi,

Tabel 3. Kompetensi Keahlian pada Spektrum Keahlian PMK Pariwisata

Bidang/Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Muatan kompetensi keahlian
Perhotelan dan Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	Pemanduan perjalanan wisata, produk kreatif dan kewirausahaan, dll
	Perhotelan	Industry perhotelan, housekeeping, dll
	Wisata Bahari dan Ekowisata	Kepemanduan wisata bahari, ekowisata, dll
Kuliner	Tata Boga	Tata hidangan, produk cake dan kue Indonesia, dll
Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	Pemangkasan dan pewarnaan rambut, dll
	Spa dan beauty therapy	Perawatan wajah pada SPA, pengelolaan usaha beauty aesthetic
Tata Busana	Tata Busana	Desain busana, pembuatan busana industri, dll
	Desain Fashion	Pembuatan hiasan, presentasi kreasi karya, dll

Sumber: Kemdikbud, 2017

sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja, administrasi umum dan bahasa asing pilihan) dan kompetensi keahlian.

Meskipun Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas SMK pariwisata salah satunya melalui penyempurnaan kurikulum, namun minat siswa untuk mengenyam pendidikan di jurusan ini masih cukup rendah. Direktur Pembinaan SMK Mustaghfirin Amin menyatakan bahwa secara kuantitas, lulusan SMK belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk pariwisata. Dimana saat ini lulusan SMK Pariwisata tercatat sebanyak 82.171 orang, sementara kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK di bidang tersebut jumlahnya mencapai 707.600 orang (Kompas, 2017).

Dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisata, Pemerintah juga turut meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang pariwisata. Salah satunya ialah melakukan perombakan kurikulum sekolah pariwisata tingkat pendidikan tinggi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini dimaksudkan agar kualitas lulusan sekolah tinggi pariwisata memiliki standar lulusan yang setara dengan negara lain sehingga bisa segera terjun ke pasar kerja. Oleh karena itu, perombakan kurikulum ini mengacu pada ACCSTP (*Asean Common Competency Standard for Tourism*

Professional) (AntaraneWS, 2014). Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) menunjuk Dewan Pengurus Pusat Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (DPP HILDIKTIPARI) dalam melaksanakan finalisasi kurikulum pendidikan tinggi pariwisata pada bulan Juni 2014 lalu. Per Maret 2017 telah diterbitkan draft final capaian pembelajaran (CP) Bidang Kepariwisataan pada 15 program studi.

Keberhasilan pariwisata juga sangat didukung oleh sambutan masyarakat terhadap pariwisata itu sendiri. Pemerintah telah mengupayakan agar pariwisata menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pariwisata ini adalah Program Desa Wisata. Program Desa Wisata sudah lama digencarkan oleh pemerintah sejak tahun 2009 melalui PNPM Mandiri bidang Pariwisata. Dimana konsep tersebut berbasis masyarakat atau *community-based tourism* yang bertujuan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan suatu daerah menjadi desa wisata tidak hanya mengangakat sisi alam dan budaya, namun sangat dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat lokal agar terjamin keberlangsungan kegiatan pariwisata di desa. Kesulitan terbesar dalam mengenalkan konsep desa pariwisata yaitu mengubah *mindset* masyarakat, sebagai contoh masyarakat yang semula dominan bermata pencaharian di bidang pertanian, kemudian mendadak dan beralih ke sektor pariwisata. Selain

mindset, kesiapan dan kapasitas dari masyarakat setempat amat diperlukan. Dengan SDM yang unggul dan dibekali oleh kompetensi yang cukup, maka dampaknya pun akan menjadi baik untuk pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh tiap desa.

Untuk itu peranan pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* pariwisata diharapkan mampu mengubah *mindset* masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa dengan pengembangan desa wisata akan menjadikan potensi wisata di desa lebih maju, serta desa lebih mandiri dan sejahtera. Di samping itu, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya pelatihan, pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pariwisata terhadap kelompok sadar wisata maupun usaha-usaha kecil menengah (UKM) yang dilakukan masyarakat setempat. Dengan peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas, khususnya pelaku kegiatan desa wisata, maka akan sangat berpengaruh dan menjadi salah satu kunci dalam peningkatan dan keberlanjutan pembangunan pariwisata di Indonesia pada umumnya.

Pentingnya pariwisata untuk peningkatan taraf hidup penduduk lokal juga terlihat dari berkembangnya industri pariwisata melalui *e-commerce*. Masyarakat telah menyadari bahwa industri pariwisata merupakan industri yang potensial untuk dikembangkan. Di era teknologi berkembang seperti saat ini, berbagai macam kebutuhan *traveling* atau wisata jelas bisa dilakukan dengan sangat mudah, bahkan hanya dengan sentuhan jari saja. Diantaranya perihal pemesanan tiket, hotel, transportasi

dengan hanya berbekal koneksi internet dapat dilakukan dengan cepat. Jika kemudahan dengan teknologi ini dikombinasikan dengan program pemerintah seperti desa wisata atau ekonomi kreatif, maka potensi pendapatan negara dari sektor pariwisata akan semakin besar.

Daftar Pustaka

BPS. 2017. Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Oktober 2017. Berita Resmi Statistik No. 110/12/Th.XX, 04 Desember 2017

Deviana, Astria. 2017. Membangun Kesadaran Masyarakat yang Melek Pariwisata. Diakses dari <http://astarideviana.blogspot.co.id>. Tanggal akses 7 Desember 2017

Hermawan B. 2012. Analisis Kontribusi Transaksi Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pariwisata. Wahana Informasi Pariwisata: Media Wisata. 7(1): 11-29.

Kementerian Pariwisata. 2016. Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) 2016.

Nur Aliah, Astrid Damarin. 2016. Peran Sektor Pariwisata dalam Pembangunan Perekonomian di Indonesia: Pendekatan Social Accounting Matrix (SAM). Institut

Pertanian Bogor (IPB). Skripsi

Widianto, Satrio. 2016. Hadapi MEA, SDM Pariwisata Lemah di Tiga Hal. Diakses kembali dari <http://www.pikiran-rakyat.com/>

Kompas. 9 September 2017. "Menaruh Asa Pada SMK Pariwisata". Diakses dari <http://biz.kompas.com/>. Tanggal akses 7 Desember 2017

BeritaSatu. 4 Juni 2015. "Kemdikbud Prioritaskan Tiga Bidang Sekolah Kejuruan". Diakses dari <http://www.beritasatu.com>. Tanggal Akses 7 Desember 2017

AntaraneWS. 3 Mei 2014. "Jelang MEA Kurikulum Sekolah Dirombak". Diakses dari <https://www.antaraneWS.com/>. Tanggal akses 7 Desember 2017

Hildiktipari. 18 Februari 2016. "DIKTI Tunjuk DPP Hildiktipari, Bahas Kurikulum Pendidikan Tinggi Pariwisata". Diakses dari <http://hildiktipari.org>. Tanggal akses 7 Desember 2017

Setiawan, Rony Ika. 2016. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 1 No. 1 (2016) hlm. 23-35.

Catatan Redaksi

Pariwisata belakangan ini telah memberikan kontribusi yang semakin besar bagi Indonesia. Bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara dan nusantara memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan ini sebaiknya juga diikuti oleh pengembangan penyedia layanan wisata dan dari sisi sumber daya manusia. Kondisi kualitas SDM pariwisata Indonesia yang masih lemah dapat menjadi preseden buruk bagi wisatawan nantinya, karena pariwisata Indonesia nantinya tidak dapat bertahan hanya dengan keindahan alamnya saja. Kualitas SDM pariwisata perlu dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan pariwisata baik secara formal maupun informal.

Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli

oleh
Slamet Widodo*)

Abstrak

Meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam jangka panjang. Melihat karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah seharusnya juga memprioritaskan upaya-upaya untuk menjaga daya beli masyarakat yang mengalami pertumbuhan melambat.

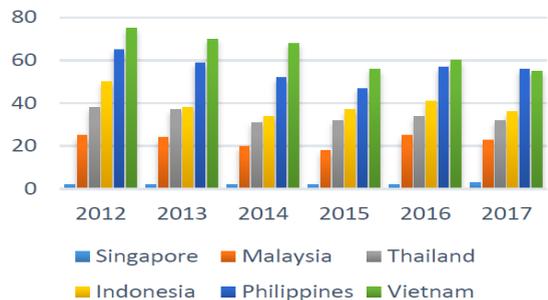
Fokus Pertumbuhan Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Perekonomian Indonesia dalam 3 tahun belakangan ini terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini seiring dengan semakin membaiknya indeks daya saing dari posisi 50 di tahun 2012 menjadi posisi 36 di tahun 2017.

Efisiensi pasar barang dan tenaga kerja serta kesiapan teknologi menjadi penyumbang terbesar membaiknya daya saing perekonomian Indonesia. Sayangnya, kondisi ini belum dapat mengubah peringkat daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 2012 – 2015, Indonesia selalu berada di peringkat keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand (gambar 1).

Selain membaiknya indeks daya saing ditingkat global, membaiknya *investment grade* Indonesia pun menjadi faktor pendorong pemerintah untuk menjadikan sektor infrastruktur sebagai pendorong perekonomian Indonesia. Meskipun setiap tahun pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur, namun kenaikan signifikan mulai dilakukan

Gambar 1. Ranking Indeks Daya Saing Negara di ASEAN 2012-2017



Sumber: World Economy Forum

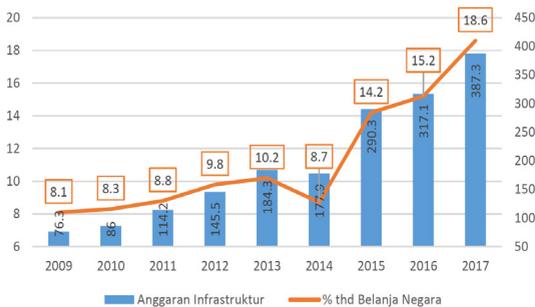
pada tahun 2015, seiring dengan lahirnya pemerintahan baru Presiden Jokowi untuk periode 2015-2019. Berdasarkan dokumen RPJMN tahun 2015-2019, setidaknya dibutuhkan kurang lebih Rp5.519,4 triliun untuk membiayai prioritas pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang sebagian besarnya (40,14 persen) atau sebesar Rp2.215,6 triliun akan dibiayai oleh APBN, sedang sisanya sebesar 30,66 persen (Rp1.692,3 triliun) diharapkan dapat dipenuhi oleh swasta, sebesar 19,32 persen dari BUMN dan sebesar 9,88 persen bersumber dari APBD.

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara dan merujuk pada besarnya kebutuhan anggaran infrastruktur tersebut, tentu saja

*)Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: eswidodo263@gmail.com

menuntut upaya efisiensi di sektor-sektor yang dianggap kurang produktif. Karenanya, mulai tahun 2016 pemerintah merealokasikan subsidi energi ke sektor-sektor yang produktif, khususnya infrastruktur dasar, dan mulai terfokus untuk meningkatkan secara signifikan belanja infrastruktur di tahun-tahun berikutnya. Bila di tahun 2014, anggaran infrastruktur masih sebesar Rp177,9 triliun, maka di tahun 2017 anggarannya mencapai Rp387,3 triliun atau mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat. Demikian halnya bila dibandingkan dengan persentasenya terhadap total APBN, maka 18,6 persen APBN dialokasikan untuk anggaran infrastruktur di tahun 2017 (gambar 2).

Gambar 2. Anggaran Infrastruktur 2009 - 2012 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Katadata

Hal ini tentunya menyisakan pertanyaan lebih lanjut tentang tepatkah strategi pemerintah untuk menggenjot sektor infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berdampak pada membaiknya kesejahteraan masyarakat. Analisis kritis yang mengemuka dalam beberapa waktu belakangan ini menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang sesungguhnya dapat menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan

yang dituangkan dalam APBN setiap tahunnya. Untuk itu, perlu dicermati karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan memang bermanfaat dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir (gambar 3) kontribusi PKRT rata-rata mencapai 55,94 persen, disusul komponen investasi (PMTDB) sebesar 32,52 persen, dan ekspor barang jasa sebesar 22,48 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam bentuk belanja rutin, hanya menyumbang sebesar 9,48 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2012 – 2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADH Berlaku) maupun riil (ADH Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun

Gambar 3. PDB Indonesia (ADHB) Menurut Komponen Pengeluaran, Tahun 2012-2016



Sumber: BPS, diolah

jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Secara tahunan, pertumbuhan tahun 2012 sampai dengan 2016 secara berturut-turut yaitu 6,03 persen, 5,56 persen, 5,01 persen, 4,88 persen, dan 5,02 persen. Laju pertumbuhan PDB menurut pengeluaran di tahun 2016 menunjukkan PKRT hanya tumbuh sebesar 5,0 persen, investasi sebesar 4,77 persen, bahkan ekspor barang jasa mengalami minus pertumbuhan sebesar -0,04 persen, sementara konsumsi pemerintah mampu tumbuh sebesar 3,36 persen.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan II tahun 2017, menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II tahun 2017, PKRT tumbuh sebesar 4.95 persen, lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama di tahun 2016 yaitu sebesar 5,04 persen.

Penurunan laju pertumbuhan sektor rumah tangga ini dapat diindikasikan telah terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Dalam gambar 4, terlihat bahwa laju pertumbuhan konsumsi per kapita per tahun juga menurun dari 4,01 persen di tahun 2012 menjadi 3,75 persen di tahun 2016.

Berbagai faktor ditenggarai menjadi penyebab turunnya daya beli masyarakat, mulai dari tingkat inflasi yang menggerus pendapatan

Gambar 4. Pertumbuhan Konsumsi RT



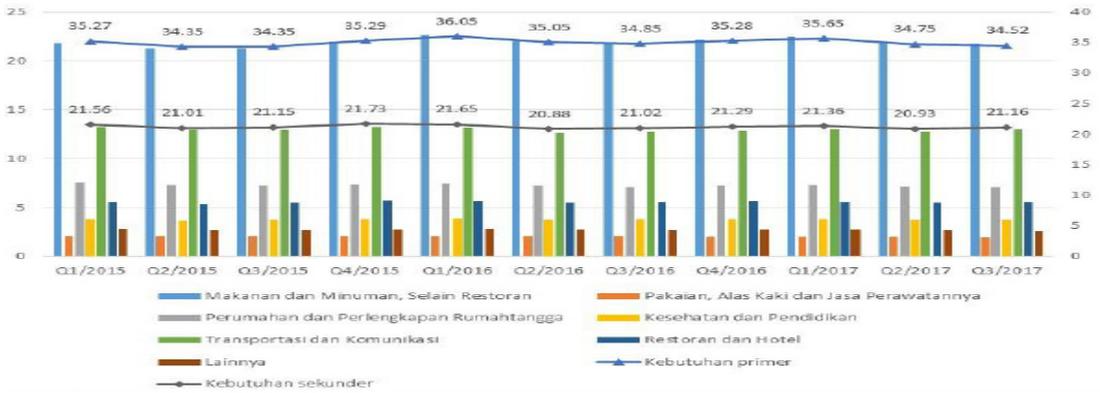
Sumber: BPS, diolah

masyarakat, kebijakan penataan subsidi listrik untuk golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang mulai dilaksanakan di tahun 2017, hingga adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat seiring dengan maraknya situs *e-commerce*.

Tak dapat dipungkiri bahwa inflasi merupakan musuh utama pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan belum tentu dapat meningkatkan daya beli masyarakat, karena nilai uang sesungguhnya yang dapat dibelanjakan mungkin menjadi lebih sedikit karena adanya inflasi. Sepanjang tahun 2017, inflasi bulanan terus berfluktuasi namun memiliki kecenderungan yang menurun. Kenaikan inflasi di bulan Juni lebih disebabkan siklus musiman menghadapi hari raya Idul Fitri, dan terus menurun hingga bulan Oktober. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, gejala penurunan tingkat inflasi bulanan sudah mulai terlihat di sepanjang tahun 2016, yang bahkan dalam beberapa bulan terjadi deflasi yaitu di bulan Februari, April dan Agustus. Tren ini mencerminkan melambatnya permintaan domestik/ daya beli masyarakat.

Indikator melemahnya daya beli masyarakat juga dapat dilihat dari pola konsumsi rumah tangga, khususnya terhadap sub indikator pengeluaran

Gambar 5. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam Triwulanan Tahun 2015-2017



Sumber: BPS, diolah

konsumsi rumah tangga. Dari data triwulan, sepanjang tahun 2015 hingga triwulan ketiga tahun 2017, terlihat adanya penurunan yang melamban terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan dan minuman, selain restoran, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, dan pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi. Kondisinya nyaris tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015.

Bila dikelompokkan menjadi kebutuhan primer (kelompok pengeluaran untuk makanan dan minuman, selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; dan kesehatan dan pendidikan) serta kebutuhan sekunder (transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel; dan lainnya), memang terjadi penurunan pengeluaran sepanjang tahun 2015 hingga triwulan III tahun 2017.

Penurunan laju pertumbuhan beberapa industri dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong lemahnya daya beli masyarakat. BPS mencatat laju pertumbuhan triwulan ketiga tahun 2015 hingga tahun 2017,

ada beberapa sektor industri yang mengalami pertumbuhan negatif, antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan (A); industri pertambangan dan penggalian (B); industri penyediaan akomodasi dan makan minum (I); industri Informasi dan Komunikasi (J); industri Jasa Keuangan dan Asuransi (K); industri *Real Estate* (L); dan industri jasa pendidikan (P). Rendahnya laju pertumbuhan industri tersebut tentunya berdampak pada besaran pendapatan masyarakat dan berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat.

Industri yang tumbuh pesat adalah industri perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (G), dimana tumbuh dari negatif 1,7 persen di triwulan I tahun 2014 menjadi 3,07 persen pada triwulan III tahun 2017. Demikian halnya dengan industri Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir (H), yang pada triwulan I tahun 2014 mencatat negatif pertumbuhan sebesar 1,4 persen menjadi 8,41 persen pada triwulan III tahun 2017. Data inilah yang dapat menggambarkan pergeseran pola belanja masyarakat yang beralih ke transaksi *e-commerce*.

Maraknya *e-commerce* ini tentunya bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 telah menduduki posisi ke 6 terbesar di dunia, dan di tahun 2018 akan menggeser posisi Jepang di urutan ke 5 dunia. Bahkan menurut *startup* Ranking, Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga di dunia yang memiliki jumlah *startup* terbanyak di bawah Amerika Serikat dan India, dengan jumlah *startup* sebesar 1.559. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memang berusaha untuk tampil di kancah dunia dalam revolusi *digital* ini. Posisi ini otomatis menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk skala regional Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi Jangka Pendek vs Jangka Panjang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih mampu bertahan pada angka positif di tengah melambatnya permintaan global, menjadi satu prestasi yang menggambarkan stabilitas ekonomi Indonesia. Fokus pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia melalui percepatan pembangunan infrastruktur belum secara optimal dirasakan manfaatnya bagi pertumbuhan industri dalam negeri. Berbagai sektor industri yang mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sinyal bahwa infrastruktur bukan menjadi satu-satunya mesin pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melambatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, memiliki kaitan dengan dengan melambatnya laju pertumbuhan industri pertanian, kehutanan, dan perikanan serta

industri penyediaan akomodasi dan makan minum. Pembangunan infrastruktur dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produktifitas, mempercepat arus barang, dan mempermudah konektifitas antar wilayah. Membbaiknya *credit rating* Indonesia seharusnya direspon secara tepat tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik semata, namun juga pembenahan prasarana dalam bentuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berbagai paket kebijakan yang telah diterbitkan harus mulai dijabarkan dalam aturan-aturan pelaksanaan agar dapat direview pada tingkat penerapannya.

Namun dalam jangka pendek, fokus pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak mengesampingkan sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi oleh pengeluaran kelompok rumah tangga (PKRT). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada gilirannya akan meningkatkan laju pertumbuhan industri. Penyediaan infrastruktur dan prasarana bagi industri akan semakin meningkatkan produktifitas sekaligus daya saing ekonomi Indonesia. Stabilitas harga pangan, yang merupakan kelompok pengeluaran terbesar konsumsi rumah tangga harus menjadi fokus pertumbuhan ekonomi Indonesia, guna meningkatkan daya beli masyarakat.

Daftar Pustaka

Anggaran Infrastruktur 2009-2017 terus meningkat. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/03/anggaran-infrastruktur-2009-2017-terus-meningkat>, diakses pada 30 November

2017

Emarketer. 2014. Internet to Hit 3 Billion Users in 2015. Diakses dari <https://www.emarketer.com>, diakses pada 30 November 2017

Kementerian PPN/Bappenas.2014. Prioritas Kedaulatan Energi Dan Infrastruktur RPJMN 2015 – 2019. Paparan Deputi Bidang Sarpras,

Bappenas, 8 Desember 2014

Startup Ranking. 2017. Startups Per Countries. Diakses dari <https://www.startupranking.com/countries>, diakses pada 30 November 2017

World Economy Forum, Global Competitive Report 2012-2017

Rekomendasi

Untuk mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan terhadap industri-industri yang mengalami pertumbuhan negatif sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Terbitnya paket kebijakan ke 16 pada bulan Agustus 2017 lalu diharapkan dapat segera dijabarkan dalam aturan pelaksanaan, sehingga segala permasalahan yang terkait dengan hambatan investasi, perizinan dan pelaksanaan berusaha dapat diatasi secara lebih efektif. Rencana pembentukan satuan tugas (satgas) dari level nasional, hingga tingkat daerah mampu menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektoral terkait dengan iklim berusaha di Indonesia.

Pengeluaran sektor komunikasi dan transportasi yang menduduki urutan ketiga dalam struktur pengeluaran rumah tangga dan pesatnya perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia memberi sinyalemen akan terjadinya pergeseran pola konsumsi masyarakat di tahun-tahun mendatang. Karenanya pemerintah harus antisipatif dalam membangun infrastruktur IT dan merumuskan kebijakan yang akomodatif dalam menghadapi revolusi digital dan inovasi usaha yang berbasis *online*.

*“Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006